

**PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN AIR
BERSIH
(STUDI KELEMBAGAAN LOKAL AIR BERSIH DI DESA DADAPAN,
KABUPATEN LUMAJANG, PROVINSI JAWA TIMUR)**

Didit Susiyanto

PT. Sumbawa Timur Mining, diditsusiyanto@gmail.com

Dyah Asri Gita Pratiwi

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dyahasrigita@yahoo.com

NikeVonika

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, nikevonika@gmail.com

Abstrak

Studi terkait pemberdayaan kelembagaan lokal dalam pengelolaan air bersih merupakan pendekatan baru ditengah meningkatnya model intervensi melalui program. Kelembagaan lokal sebagai media pemberdayaan kelembagaan lokal sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial sehingga perlu dilakukan pembahasan mengenai mekanisme menjalankan kelembagaan lokal, proses pemberdayaan kelembagaan lokal oleh masyarakat dan manfaat yang diperoleh dengan pendekatan kelembagaan lokal pada pengelolaan air bersih di desa Dadapan, Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Penelitian menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam dengan 23 informan. Hasilnya menunjukkan terjadi keefektifan pendekatan kelembagaan lokal dalam pengelolaan air bersih sehingga memunculkan partisipasi anggota pada kegiatan pengelolaannya. Keberadaanya memberikan manfaat bagi masyarakat dan terpeliharanya nilai dan budaya lokal di desa Dadapan.

Kata Kunci: Pengelolaan air bersih, kelembagaan lokal, pemberdayaan

Abstract

Studies related to the empowerment of local institutions in the management of clean water is a new approach in the midst of increasing models of intervention through programs. Local institutions as media local institutional empowerment an effort to improve social welfare so it is necessary to discuss the mechanisms for running local institutions, the process of empowering local institutions by the community and the benefits obtained by local institutional approaches to clean water management in the Dadapan Village, Lumajang Regency, East Java Province. This research used qualitative case study research, collecting data through in-depth interviews with 23 informants. The results show that there is an effectiveness of the local institutional approach in the management of clean water so that members participate in its management activities. Its existence provides benefits to the community and maintains local values and culture in the Dadapan Village.

Key Word: Water management, local institution, empowerment .

Pendahuluan

Kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses layanan air bersih dan sanitasi dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini seperti laporan Badan Pusat Statistik tahun 2009. Pada tahun 2007, rumah tangga miskin yang menikmati sarana air bersih sebesar 48,45 persen dan ditahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 53,36 persen. Sedangkan masyarakat miskin yang belum memiliki fasilitas sanitasi berupa jamban sendiri (menggunakan jamban bersama dan jamban umum) pada tahun 2007 sebesar 59,09 persen dan ditahun 2009 mengalami penurunan sebesar 58,85 persen. Sedangkan menurut laporan *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2010. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan sebesar 47,71 persen, dengan rincian 49,82 persen di wilayah perkotaan dan 45,72 persen di wilayah perdesaan. Sedangkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak sebesar 51,19 persen meliputi di wilayah perkotaan 69,51 persen dan di perdesaan sebesar 33,96 persen. (Bappenas, 2010).

Meskipun terjadi peningkatan, wilayah yang mudah mendapatkan layanan tersebut masih di dominasi wilayah perkotaan. Kondisi ini menunjukkan ketidakmerataan program pembangunan air bersih dan penyehatan lingkungan di Indonesia dan masih terfokus di daerah perkotaan. Menurut Santono (2010) terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya peningkatan sarana air bersih dan sanitasi dasar diantaranya: pertama, persoalan

infrastruktur, meliputi persoalan bagaimana menjaga dan memperluas jaringan infrastruktur yang telah tersedia. Kedua, dengan memahami air bersih sebagai kebutuhan dasar persoalan sosial politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan, misalnya tarif yang terjangkau, transparansi dan akuntabilitas. Ketiga adalah persoalan lingkungan dan kesehatan publik, dimana konservasi dan pengelolaan lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyediaan layanan air.

Dalam bidang air bersih, khususnya di wilayah perdesaan, pemerintah membuat kebijakan program air bersih untuk masyarakat yang berpendapatan rendah atau *Water and Sanitation for Low Income Communities II* (WSLIC-2). Menurut laporan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan diperkirakan pada akhir tahun 2006 terdapat 2.000 desa yang ditargetkan menerima program sarana air bersih dan penyehatan lingkungan melalui proyek WSLIC-2. Program WSLIC-2 ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan pemberdayaan, masyarakat dilibatkan langsung dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan sehingga masyarakat menentukan sendiri pilihan teknologi sarana yang akan dibangun. Program ini bertujuan meningkatkan status kesehatan dengan cara penyediaan air minum dan sanitasi yang aman serta berkesinambungan. Dengan harapan terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih, peningkatan kesehatan dan sanitasi melalui pelayanan kesehatan dan perubahan perilaku, serta pengelolaan manajemen

proyek. (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, 2003).

Namun terdapat kendala yang dihadapi oleh program WSLIC-2 yaitu pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang mengerti pengelolaan program. Kedua, pembiayaan infrastruktur keuangan proyek langsung masuk ke rekening masyarakat. Ketiga, kurangnya pemahaman dari pelaksana di daerah terhadap pendekatan *demand driven* berakibat pada relatif lambatnya tanggapan masyarakat terhadap program ini. (Nu'man, Afif, et al, 2008). Program penyediaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan sampai saat ini mengalami permasalahan kesinambungan seperti tata kelola organisasi, perawatan sarana dan prasarana air bersih dan upaya konservasi sumber daya air. Menurut Diesendorf and Hulminton (1997) bahwa permasalahan air bersih memiliki dimensi yang beragam tidak hanya dikaitkan dengan *instrumental value* yang dapat dinilai hanya sebatas produksi, konsumsi dan *supply chain* distribusinya seperti "barang". Namun air adalah kehidupan dan sumber penghidupan, dimana setiap kehidupan memiliki *intrinsic value* sehingga air lebih dari sekedar sebagai nilai sosial, ekonomi, religius, kultural dan lingkungan.

Terkait penjelasan diatas, keberadaan air bersih harus dikelola berdasarkan prinsip dan nilai lokal di masyarakat melalui pendekatan kelembagaan lokal, sehingga memunculkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan air bersih di dalamnya. Hal ini mengingat keberadaan air bersih merupakan bagian dari *intrinsic value* bagi masyarakat sebagai penunjang kehidupan

ekonomi, sosial-budaya, pendidikan dan kesehatan guna mencapai derajat kesejahteraan masyarakat. Melihat pentingnya peran air bersih bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, maka dipandang perlu untuk melihat kisah sukses kelembagaan lokal dalam mengelola air bersih melalui bentuk kegiatan pengembangan masyarakat dalam penyediaan air bersih yang difasilitasi oleh kelembagaan lokal, dan keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengelola air bersih.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan tipe *qualitative case study* yang bertujuan untuk memberikan diskripsi akurat mengenai mengenai mekanisme menjalankan kelembagaan lokal, proses pemberdayaan kelembagaan lokal oleh masyarakat dan manfaat yang diperoleh dengan pendekatan kelembagaan lokal pada pengelolaan air bersih di desa Dadapan. Dengan demikian, realitas sosial yang ada di masyarakat dapat memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi sehingga kelembagaan lokal yang hadir di masyarakat menjadi jelas makna dari konstruk sosial yang terkandung melalui konteks sosio-historis (Neuman, 2006).

Penelitian ini bertempat di desa Dadapan, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Alasan utama pemilihan desa Dadapan sebagai lokasi dalam penelitian karena terdapat kelembagaan lokal bidang air bersih yaitu paguyuban Tirta Mandiri berhasil memberikan kontribusi pada masyarakat Desa Dadapan sebagai wadah untuk menampung dan menangani kebutuhan air

bersih dengan menggunakan dana swadaya murni dari masyarakat tanpa bantuan dari pemerintah. Informasi tentang keberhasilan Tirta Mandiri dalam pengelolaan air bersih dijelaskan juga oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Tahun 2010.

Jenis sampling penelitian ini menggunakan *non-probability sampling* atau *nonrandom samples*. Sedangkan penarikan informannya terbagi menjadi dua bentuk yaitu menggunakan teknik penarikan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penarikan informan yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* berjumlah 5 orang informan yang terdiri dari tokoh masyarakat (1 orang), kepala desa Dadapan (1 orang) dan pengurus paguyuban Tirta Mandiri (3 orang). Untuk penarikan informan melalui teknik *snowball sampling* berjumlah 18 informan yang terdiri dari ketua kelompok (4 orang) dan anggota kelompok (14 orang). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui tiga cara yaitu: wawancara mendalam melalui individu maupun kelompok (*individual in-depth interview* dan *group interview*), observasi dan pengumpulan data melalui yang bersumber dari dokumentasi dan literatur atau data non manusia sebagai data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Aspek regulatif dalam kelembagaan menfokuskan pada pembatasan atau larangan melalui pembuatan aturan kelembagaan terkait perilaku manusia yang menjalani aktivitas di organisasi tersebut. Aspek regulatif yang dijalankan oleh paguyuban Tirta Mandiri dalam mekanisme

mengelola air bersih terbagi menjadi empat element antara lain: (1) pembuatan struktur kepengurusan, (2) sistem keanggotaan, (3) mekanisme aturan pemilihan kepengurusan, (4) mekanisme keuangan.

Terbentuknya struktur pengurus mempermudah pembagian tugas dan peran dalam menjalankan kebijakan organisasi sesuai dengan tujuan dari misi dan visi organisasi. Menurut Scoot (2008) bahwa secara khusus gabungan dari pilar regulatif harus dihormati dalam proses pembuatan aturan, tata aturan, monitoring dan kegiatan sanksi. Dari konsep Scoot yang telah dijelaskan terkait proses pembuatan aturan pada kelembagaan dalam pembentukan struktur kepengurusan memiliki kesamaan dengan kondisi yang terjadi di paguyuban Tirta Mandiri, dimana struktur kepengurusan dipilih berdasarkan pembuatan aturan terkait mekanisme pemilihan pengurus melalui jalan musyawarah anggota di lembaga. Sedangkan sistem keanggotaan di Tirta Mandiri menggunakan sistem anggota terbuka bagi masyarakat namun untuk menjadi anggota formal harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berada di peraturan. Selain itu juga, banyak warga yang menjadi anggota non formal (*follower*) di Tirta Mandiri atas kerjasamanya dalam kegiatan penyediaan air bersih di desa Dadapan.

Pembuatan aturan pada pelaksanaan pemilihan pengurus melalui rapat anggota memunculkan tata aturan baru dalam memberikan peran dan tanggung jawab pada pengurus yang telah terpilih seperti ketua bertanggung jawab mengontrol kegiatan paguyuban, sekretaris bertanggung jawab mengelola administrasi

dan petugas teknis bertanggung jawab terkait sistem keamanan dan pembenahan fasilitas air bersih. Berdasarkan peran dan tanggung jawab yang diemban oleh pengurus Tirta Mandiri memiliki kesamaan dari konsep Commons (1924) bahwa aturan kelembagaan diperlukan untuk menentukan batas-batas dimana individu dan lembaga dapat mencapai tujuan mereka.

Pembuatan tata aturan di Tirta Mandiri guna menjaga kesinambungan pada perawatan fasilitas air bersih yang telah dibangun dilakukan melalui mekanisme keuangan. Tata aturan keuangan di Tirta Mandiri pelaksanaannya bertumpu pada iuran anggota sebesar Rp. 10.000 per orang. Berkaitan dengan hal tersebut, Scoot (2008) menjelaskan bahwa pembuatan peraturan dan tata aturan kelembagaan membutuhkan pengawasan terhadap pelaksanaan. Berdasarkan konsep Scoot dengan temuan yang ada dilapangan memiliki kesamaan yaitu pembuatan tata aturan keuangan di kelembagaan dapat menjadi kontrol terkait manajemen tata kelola organisasi dalam menjaga aset yang menjadi pendukung keberadaan lembaga sampai sekarang dan juga pada pelaksanaannya menjadi kontrol dari tanggung jawab yang diemban oleh pengurus dalam menjalankan tugas dalam mengelola air bersih di Tirta Mandiri. Selain itu, ada keunikan dalam mekanisme keuangan yang ada di paguyuban Tirta Mandiri yaitu menggabungkan kegiatan pembayaran iuran bulanan dengan kegiatan arisan dan spiritual. Hal ini seperti konsep Durkheim (1912) bahwa kelembagaan merupakan hasil dari proses interaksi dalam sistem simbol, dimana sistem kepercayaan

dan gambaran bersama atau *collective representation* serta pengetahuan memiliki moral dan spiritual sehingga sistem tersebut merupakan hasil karakter dari interaksi manusia yang dialami oleh individu sebagai tujuan hidup dan hasilnya kumpulan dari sistem tersebut mengalami kristalisasi dan membentuk kelembagaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat sanksi di lembaga apabila ada anggota dan pengurus yang menyimpangan dan tidak sesuai dengan sistem peraturan yang telah ditetapkan pada pembayaran iuran air bersih. Menurut Scoot (2008) pembuatan aturan dengan melibatkan kemampuan untuk menetapkan peraturan, sanksi dan hukuman, dalam upaya untuk mempengaruhi perilaku ke depan. Bentuk sanksi di paguyuban Tirta Mandiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu sanksi formal berupa pemberhentian sebagai anggota paguyuban apabila tidak mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan. Sedangkan sanksi informal pengasingan anggota di masyarakat sebagai simbol individu yang tidak taat terhadap tata aturan di kelembagaan sebagai bagian dari sistem sosial di desa Dadapan. Berdasarkan konsep Scoot terkait dengan mekanisme sanksi yang terdapat di paguyuban Tirta Mandiri dapat disimpulkan bahwa, pembuatan peraturan pada kegiatan kelembagaan melalui bentuk sanksi dapat mempengaruhi perilaku anggota ke depan untuk memberikan efek jera pada tindakan indivisu yang melanggar aturan.

Aspek normatif di kelembagaan memfokuskan pada kewajiban atau mandat kelembagaan dalam menjalankan kegiatan di masyarakat sesuai dengan norma yang ada dan norma tersebut menjadi pedoman

dalam menjalankan aktivitas kegiatan di kelembagaan. Di paguyuban Tirta Mandiri aspek normatif terbagi menjadi dua bentuk yaitu (1) pedoman evaluasi lembaga terkait kebijakan yang akan dibuat berdasarkan bentuk musyawarah anggota dan musyawarah khusus, (2) tanggung jawab sosial pada pengelolaan air bersih di paguyuban Tirta Mandiri.

Menurut Scoot (2008) bahwa pilar normatif menitik beratkan pada aturan normatif yang memberikan ketentuan atau petunjuk, mengevaluasi, kewajiban kedalam dimensi kehidupan sosial. Di paguyuban Tirta Mandiri bentuk pedoman pengevaluasian dilakukan melalui musyawarah anggota untuk memberikan masukan dan kritikan terhadap kinerja pengurus. Selain itu, musyawarah khusus dilakukan jika terjadi penyelewengan anggota dan pengurus yang dapat merugikan paguyuban Tirta Mandiri. Dari konsep yang dikemukakan oleh Scoot dengan di Tirta Mandiri dapat disimpulkan bahwa pilar normatif yang berupa ketentuan evaluasi terhadap lembaga dilakukan dalam bentuk musyawarah sebagai petunjuk dalam membuat kebijakan. Namun musyawarah yang dibuat harus mengikuti pedoman di Tirta Mandiri dengan tujuan untuk menstabilkan kepercayaan sosial dan norma-norma yang baik diinternalisasikan dan diberlakukan pada anggota.

Selain itu, pilar normatif juga berdampak memunculkan tanggung jawab sosial pada pengelolaan air bersih. Bentuk tanggung jawab sosial berupa pembangunan fasilitas sarana umum yang diperuntukkan bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang membutuhkan

sarana air bersih. Menurut Scoot (2008) bahwa perangkat normatif bertujuan untuk memeriksa interaksi dari instrumental dan normatif dalam tindakan sosial.

Terkait dengan pilar normatif berupa musyawarah di Tirta Mandiri dapat dijadikan pedoman evaluasi untuk memberikan masukan dan kritikan kepada kinerja pengurus dan juga sanksi yang bersumber dari norma. Sehingga tujuan yang diharapkan dapat memunculkan kepercayaan sosial antara anggota

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pilar normatif dapat mendorong lembaga untuk memberikan kewajibanya di masyarakat atas keberdaan usaha yang dilakukan untuk guna menentukan cara pengelolaan air bersih yang adil dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sehingga norma yang terdapat di masyarakat diinternalisasi elemen dari sistem kepribadian bahwa air merupakan simbol ikatan sosial, orientasi nilai pada pemberian kewajiban sosial lembaga pada masyarakat dan objek orientasi yang ada di luar individu untuk mengatur kehidupan di masyarakat agar dalam pengelolaan air memiliki orientasi dimasa yang akan datang.

Aspek kultural-kognitif pada kelembagaan menekankan pada pada konsepsi bersama terkait sifat dari realitas sosial yang ada di masyarakat melalui kerangka makna yang dibuat bersama kedalam bentuk lembaga. Realitas sosial yang muncul di masyarakat dalam bentuk budaya dan menjadi mediasi pengetahuan individu yang tergabung di lembaga dari dunia eksternal yang terdapat di kehidupan masyarakat. Aspek kultural-kognitif di paguyuban Tirta Mandiri terbagi atas dua

bentuk yaitu: (1) pengetahuan nilai lokal masyarakat dan (2) budaya masyarakat. Menurut Scoot (2008) bahwa fokus kultural-kognitif di kelembagaan adalah pada bagaimana kehidupan sosial menggunakan kerangka makna dan bagaimana makna-makna diproduksi dan direproduksi. Pengetahuan terkait nilai lokal berupa nilai kebersamaan dan kekompakan diantara anggota dan pengurus, sehingga identitas tersebut memunculkan pemahaman bahwa air bersih adalah ikatan sosial, dan pengelolaan air bersih lebih mengarah pada nilai sebuah simbol air dalam bentuk solidaritas sosial.

Dari penjelasan diatas jika dilihat dari konsep Scoot dapat disimpulkan bahwa realitas sosial yang didalamnya berisi nilai lokal di masyarakat diproduksi kedalam bentuk kelembagaan sehingga menjadi pedoman dalam pengelolaan air bersih. Pedoman yang dihasilkan melalui penginternalisasian nilai di lembaga dapat membentuk mekanisme kebijakan untuk memberikan pelayanan bagi anggota dalam memperoleh air bersih serta membuka kesempatan masyarakat untuk terlibat secara informal tetapi pengetahuan individu menjadi bagian dari paguyuban Tirta Mandiri menjadi kuat. Pemaknaan simbol air yang diproduksi dari nilai lokal membentuk ikatan sosial menjadi ciri khas dari mekanisme yang ada di paguyuban Tirta Mandiri.

Sedangkan jika ditinjau dari bentuk budaya masyarakat yang berbentuk gotong royong dalam pengelolaan sekaligus penyediaan air bersih di Tirta Mandiri menjadi simbol yang berada di kelembagaan. Pada kegiatannya, budaya menjadi pendorong lembaga untuk

mempercepat kebijakan program yang akan dibuat. Selain itu juga budaya menjadi media untuk menangani terjadinya konflik antar pengurus dengan anggota. Sehingga budaya dapat dijadikan aturan dan pedoman di paguyuban sebagai bentuk cermin dalam bertindak dan berperilaku seluruh anggota. Menurut Scoot (2008) elemen kultural-kognitif melekat pada bentuk kultural seperti pemeliharaan bentuk budaya agar menjadi pedoman masyarakat, penguatan ritual dan penjelasan simbol dalam realitas kehidupan yang biasanya digunakan sebagai pemikiran yang terdapat dalam kebudayaan di masyarakat.

Dari penjelasan Scoot terkait pelekatan kultural di lembaga memiliki kesamaan dengan mekanisme pengelolaan air bersih di Tirta Mandiri, bahwa pengelolaan air bersih di kelembagaan harus dapat memelihara budaya sebagai pedoman bagi pengurus dan anggota sehingga penguatan simbol air bersih menjadi solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan pada pengelolaannya. Budaya sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan lembaga yang didalamnya membentuk kehidupan di masyarakat sebagai media yang direproduksi dari kebiasaan adat-istiadat yang terdapat di desa Dadapan.

Pemberdayaan Kelembagaan Lokal oleh Masyarakat

Sebagai upaya dalam penyediaan air bersih dengan swadaya murni dari masyarakat, maka aktor paguyuban sebagai *community worker* mulai menjalin kerjasama dengan anggota dan masyarakat guna melakukan proses pengembangan masyarakat agar dapat menemukan solusi terkait rendahnya

akses air bersih di desa Dadapan. adapun tahapan pengembangan masyarakat yang difasilitasi oleh paguyuban Tirta Mandiri dalam penyediaan air bersih antara lain:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini dilakukan melalui dua bentuk yaitu: (1) persiapan aktor di kelembagaan untuk melakukan sosialisasi menjalin kerjasama dengan tokoh dan masyarakat, (2) *community worker* melakukan persiapan sumber mata air dan sumber daya lokal yang membantu kegiatan di lapangan. Pelibatan masyarakat dalam tahap persiapan bertujuan memberikan peran aktif untuk berpartisipasi sehingga memunculkan kesadaran guna menyelesaikan permasalahan akses air bersih di desa Dadapan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ife (2008) bahwa strategi dalam pengembangan masyarakat harus peningkatan kesadaran kritis agar individu dan kelompok mampu mengambil tindakan sendiri dalam termasuk didalamnya proses pemecahan masalah untuk kemudian membentuk partisipasi yang aktif dan masyarakat sebagai subyek bukan obyek.

Tahap Pengkajian

Menurut Adi (2008) bahwa proses pengkajian atau *assessment* dilakukan dengan mengidentifikasi masalah seperti kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Tahap pengkajian yang dilakukan di desa Dadapan oleh pengurus Tirta Mandiri terdiri dari dua bentuk yaitu: (1) identifikasi permasalahan terkait kelayakan sumber air bersih dan jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibutuhkan dan (2) kegiatan identifikasi melalui kegiatan musyawarah dan konsesus di sistem sosial. Dari konsep

yang dijelaskan oleh Adi mengenai proses pengkajian dengan kegiatan pengkajian yang dilakukan di desa Dadapan dapat disimpulkan pengkajian terkait permasalahan akses air bersih dapat mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga dapat menentukan besarnya rencana biaya yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut seperti penentuan biaya pada pembangunan sarana yang digunakan untuk mendistribusikan ke desa Dadapan.

b. Perencanaan Kegiatan

Adi (2007) menjelaskan bahwa tahap perencanaan kegiatan merupakan tahapan dimana *community worker* secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Terkait dengan penjelasan diatas, tahap perencanaan kegiatan yang dilakukan pengurus paguyuban Tirta Mandiri bertujuan untuk menganalisa dan menyelesaikan masalah bersama masyarakat melalui pembuatan sebuah rencana alternatif berupa gambaran peta wilayah pembangunan fasilitas air bersih dan kerjasama dengan pihak luar dengan mengacu pada keputusan yang telah ditetapkan bersama. Konsep yang dijelaskan oleh Adi mengenai tahapan perencanaan kegiatan memiliki kesamaan dengan tahapan perencanaan di paguyuban Tirta Mandiri, yang intinya memberikan keleluasaan bagi masyarakat yakni anggota paguyuban untuk melatih kemampuan dalam menganalisa dan menyelesaikan masalah melalui pembuatan sebuah rencana alternatif kegiatan sehingga anggota ikut serta terlibat pada kegiatan

tersebut dengan mengacu pada keputusan yang telah ditetapkan bersama

c. Tahap Formulasi Rencana Aksi

Menurut Adi (2008) bahwa formulasi rencana aksi bertujuan untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada. Terkait penjelasan tersebut, formulasi rencana aksi yang dilakukan oleh paguyuban Tirta Mandiri dilakukan melalui dua bentuk yaitu: (1) menentukan aksi dari kegiatan yang akan dilakukan, (2) pembuatan formulasi kerja kelembagaan.

Konsep yang dijelaskan oleh Adi mengenai formulasi rencana aksi diatas sesuai dengan kegiatan di paguyuban Tirta Mandiri. Formulasi rencana aksi dapat dilakukan jika ada partisipasi dari masyarakat untuk menentukan aksi dari program yang dibuat guna menyelesaikan permasalahan yang ada dengan pemformulasian rencana kerja seperti kegiatan gotong royong dalam pembangunan sarana air bersih dan pembiayaan pembangunan sarana tersebut. Dengan seperti itu, anggota bersama pengurus membuat sebuah perencanaan kegiatan, dan kemudian menyepakati kegiatan yang telah ditentukan dan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang dibuat, sehingga memunculkan tindakan untuk membuat langkah-langkah lebih detail pada pelaksanaannya dilapangan.

d. Tahap Pelaksanaan

Menurut Sanim (2011) bahwa implementasi penyediaan air bersih pada hakikatnya adalah usaha dalam membuat kebijakan dan strategi pengembangan air bersih yang diarahkan pada pemenuhan

kebutuhan sosial, budaya, ekonomi dan kesehatan guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Pada kegiatan implementasi, proses yang dilakukan dengan menggunakan teknik untuk mengembangkan air guna membantu masyarakat dalam pelaksanaan dilapangan. Tahap pelaksanaan yang dilakukan dalam penyediaan air bersih di paguyuban Tirta Mandiri pada masyarakat desa Dadapan dilakukan melalui 4 bentuk diantaranya adalah (1) pembangunan hidran induk dan hidran umum, (2) gotong royong penggalian pipa air bersih, (3) pembangunan unit hidran kelompok, (4) pemasangan pipa distribusi ke rumah masyarakat.

Berdasarkan konsep pelaksanaan yang dijelaskan oleh Sanim pada penyediaan air bersih di masyarakat Dadapan dapat disimpulkan bahwa kebijakan lembaga dalam pembangunan fasilitas air bersih merupakan bentuk strategi pengembangan masyarakat dalam upaya pemenuhan hak dasar terhadap akses air bersih sehingga teknik yang digunakan harus membutuhkan partisipasi yang aktif dari setiap individu untuk saling bekerja dan pembentukan cara berfikir yang menghargai saling interaksi di diantara masyarakat Dadapan, menghargai kualitas pengalaman kolektif, dan memaksimalkan potensi mereka dan mencapai kemanusiaan mereka secara utuh melalui pengalaman proses masyarakat. Interaksi antar individu yang berada di dalam sistem kelembagaan lokal dengan individu di dalam sistem sosial desa Dadapan memunculkan pengalaman kolektif untuk membentuk kekuatan dengan memaksimalkan potensi dari setiap sistem dari kedua belah pihak

(pengurus/ anggota dengan masyarakat) dalam mempercepat penyelesaian air bersih melalui bentuk pembangunan fasilitas air bersih dari hulu hingga hilir. Hal ini disadari bahwa air bersih juga menjadi pengikat atau simbol dari masyarakat sebagai bentuk ikatan sosial.

e. Tahap Evaluasi

Menurut Adi (2007) bahwa evaluasi sendiri dilakukan pada input, proses (pemantauan atau *monitoring*) dan juga pada hasil. Pada tahap evaluasi, proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaliknya dilakukan dengan melibatkan warga karena dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri. Pendekatan model evaluasi yang dilakukan pada kegiatan penyediaan air bersih oleh paguyuban Tirta Mandiri bersifat sederhana dengan melibatkan seluruh anggota paguyuban sebanyak-banyaknya melalui musyawarah anggota dan diskusi setelah pelaksanaan swadaya. Adapun kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk melihat efektif atau tidaknya kegiatan yang telah dilakukan dapat dilihat dari tiga aspek antara lain: (1) mengevaluasi pembangunan fasilitas air bersih, (2) tingkat kelancaran debit air, (3) kinerja pengurus paguyuban Tirta Mandiri.

Dari ketiga aspek diatas jika di tinjau dari perspektif evaluasi menurut Adi dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyediaan air bersih melalui swadaya

masyarakat yang difasilitasi oleh Paguyuban Tirta Mandiri telah berjalan secara efektif dan terpadu. Bahkan efektifnya kegiatan paguyuban dalam mengelola air bersih dapat dilihat dari jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi, lancaranya debit air bersih ke rumah warga yang menerima layanan dari paguyuban Tirta Mandiri dan meningkatnya performa kinerja pengurus dalam menjalankan dan mengelola organisasi.

f. Tahap Terminasi

Menurut Adi (2008) bahwa terminasi tahap dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Berkaitan dengan penyediaan air bersih di desa Dadapan yang difasilitasi oleh Tirta Mandiri. Kegiatan terminasi dilakukan oleh pengurus 3 hari setelah selesainya pembangunan fasilitas air bersih. Hal ini dikarenakan dari kegiatan musyawarah anggota pada evaluasi pembangunan air bersih tidak mengalami hambatan pada pendistribusiannya di masing-masing rumah.

Berdasarkan konsep Adi dan kenyataan dilapangan menyimpulkan bahwa terminasi yang terjadi pada kegiatan penyediaan air bersih ini telah memunculkan kemandirian masyarakat untuk terus menjaga kesinambungan dari kegiatan yang telah dilakukan dengan ikut terlibat menjadi anggota paguyuban Tirta Mandiri pada agenda kegiatan lembaga. Sehingga kegiatan penyediaan air bersih dengan membangun sarana yang telah dibuat dapat dipelihara dengan baik dan di kontrol sesuai mekanisme yang terdapat di paguyuban Tirta Mandiri.

Manfaat Kelembagaan Lokal

Menurut Wibowo (2011) bahwa lembaga lokal dapat memfasilitasi kemampuan adaptasi program-program pembangunan (*adaptation of program*) terhadap variasi lingkungan fisik dan sosial yang beragam dan dengan demikian membantu meningkatkan efesiensi program. Berkaitan dengan penjelasan diatas, mekanisme tata kelola kelembagaan di Tirta Mandiri diadopsi kedalam kelembagaan pendidikan dengan membentuk sekolah bagi anak usia dini melalui inisiatif warga membuat program pendidikan. Hal ini tidak lepas dari kurang efektifnya program pemerintah di masyarakat dan juga sudah terpenuhinya kebutuhan dasar khususnya akses air bersih. Sehingga kelembagaan lokal melalui anggotanya mencoba untuk mengadaptasi program pemerintah dengan membentuk lembaga pendidikan bagi anak-anak guna meningkatkan efesiensi dari program pemerintah yang kurang berjalan kurang efektif dilapangan.

Kelembagaan lokal dapat meningkatkan efesiensi pembangunan karena kelembagaan dapat membantu menyediakan informasi yang akurat dan representatif (*accurate and representatif information*) tentang kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat serta umpan balik terhadap inisiatif dan pelayanan pemerintah. Keberadaan paguyuban Tirta Mandiri berkontribusi besar dalam bidang kesehatan. Kesehatan merupakan pilar yang penting bagi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesejahteraan. Untuk itu, kelembagaan lokal berupaya menciptakan kondisi lingkungan sehat dengan cara menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang kesehatan

berupa penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar melalui program Jamban Sehat. Dengan demikian program-program pembangunan yang digagas pemerintah dapat berjalan efektif melalui kerjasama dengan lembaga untuk menyediakan informasi terkait kondisi kesehatan dan pemecahan masalahnya. Sehingga informasi yang diperoleh menjadi akurat dan representatif sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam menerima program yang didapat. Dengan demikian usaha untuk menciptakan kondisi yang sehat dapat tercapai melalui kelembagaan lokal dengan program yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat.

Kelembagaan lokal dapat membantu meningkatkan efesiensi program melalui sumber daya (*resources mobilization*) melalui kegiatan gotong royong. Penyediaan air bersih yang difasilitasi oleh paguyuban Tirta Mandiri dilakukan secara swadaya murni dari masyarakat. Walaupun dana yang dikeluarkan pada kegiatan tersebut cukup besar namun masyarakat tidak menyurutkan semangat untuk mendapatkan air melalui penggunaan sumber daya lokal yang berasal dari budaya desa Dadapan yaitu budaya gotong royong. Melalui sistem kerja pembangunan fasilitas air bersih secara gotong royong dapat mengurangi beban biaya yang besar dan juga sistem pembiayaan yang ditanggung secara berkelompok dapat memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat lain yang berpendapat rendah untuk ikut serta terlibat di kegiatan tersebut. Sehingga beban pembiayaan ditanggung oleh seluruh masyarakat yang terlibat didalam

kelembagaan. Selain itu, dengan keberadaan air yang sudah dinikmati oleh warga dapat digunakan sebagai sarana kegiatan usaha seperti budidaya ikan dan ayam, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Dadapan.

Menurut Wibowo (2011) bahwa lembaga lokal dapat dikembangkan partisipasi dan kerjasama masyarakat dalam pelaksanaan program yang melibatkan perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan teknologi. Partisipasi yang besar dalam penyediaan sarana air bersih di masyarakat menunjukkan bahwa masih kuatnya nilai solidaritas sosial. Nilai tersebut merupakan cerminan dari budaya gotong royong di desa Dadapan yang telah menjadi kebiasaan selama puluhan tahun. Dengan adanya pengelolaan air bersih di paguyuban Tirta Mandiri, nilai-nilai sosial pada masyarakat Dadapan telah terlembaga dengan baik. Bahkan nilai sosial sebagai pendukung keberadaan budaya dan adat-istiadat di desa Dadapan menjadi cara pandang kelembagaan untuk memahami makna entitas air bersih sebagai *common property*. Sehingga keberadaan air bersih dapat mendukung kegiatan budaya dan adat-istiadat yang berada di desa Dadapan.

Kesimpulan

Keberhasilan pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh paguyuban Tirta Mandiri merupakan salah satu bentuk pendekatan pembangunan di bidang air bersih yang memfokuskan pada pendekatan kelembagaan lokal di masyarakat sebagai wadah untuk menangani permasalahan terhadap rendahnya akses air bersih yang selama ini dialami oleh masyarakat desa Dadapan. Dalam menjalankan pengelolaan air bersih di tingkat masyarakat Dadapan,

mekanisme yang dilakukan paguyuban Tirta Mandiri agar terjadi kesinambungan dalam menjalankan kegiatan kelembagaan lokal guna melayani akses air bersih di masyarakat dilakukan melalui tiga mekanisme yaitu: (1) mekanisme regulatif yang didalamnya terkait pembuatan aturan dan tata aturan serta sanksi di dalam kegiatan kelembagaan, (2) mekanisme normatif yang didalamnya memfokuskan pada kewajiban kelembagaan dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan norma melalui bentuk musyawarah anggota dan khusus terkait kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga dan juga kewajiban sosial lembaga pada sistem sosial di desa Dadapan, (3) mekanisme kultural-kognitif menekankan pada penguatan nilai-nilai lokal yang menjadi faktor pendorong pemantaban paguyuban Tirta Mandiri sebagai wadah pelesatarian adat-istiadat dan juga budaya yang menjadi simbol dari bentuk pengelolaan air bersih di lembaga.

Referensi

- Adi, Isbandi Rukmito. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Adi, Isbandi Rukmito. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Air Minum dan Kesehatan Lingkungan. (2003). *Water and Sanitation for Low Income Communities Project Majalah Percik Edisi II Oktober*.

- Badan Pusat Statistika. (2009). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2009*. Jakarta. Edition).Needham Heights. MA: Allyn & Bacon.
- Bappenas. (2010). *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2010*. Jakarta
- Diesendorf and Hulminton (1997) *Human Ecology, Human Economy: Ideas for an Ecologically Sustainable Future*. NSW: Ellen & Unwin
- Durkheim, E. (1912) *The Elementary Forms of Religious Life*. In: Jones, R.A., Ed., *Emile Durkheim: An Introduction to Four Major Works*. Washinton DC: Sage Publications, Inc
- Ife, Jim and Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. (Translated by Sastrawan Manulang, Nurul Yakin dan M. Nursyahid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nu'man, Afif, et al, ed. (2008). *Pembangunan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia: Pembelajaran Dari Berbagai Pengalaman*. Jakarta: Pokja AMPL.
- Neuman, W Lawrence. (2006). *Social Research Methode: Qualitative and Quantitative Approach* (Sixth Studio and Clinic.
- Santono, Hanung. (2010). *Air Bersih Dan Sanitasi Sebagai Kebijakan Sosial*. Jakarta: Komunitas Indonesia.
- Samin, Bunasor.(2011). *Sumber Daya Air dan Kesejahteraan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Bogor: IPB Press.
- Scoot, Richard. (1995). *Institutions and Organizations Foundations for Organizational Science*. USA. Sage Publication.
- Scoot, Richard. (2008). *Institutions And Organization: Ideas and Interest*. USA: Sage Publication.
- Uphoff, Norman. (1986). *Local Institution Development: An Analytical Sourcebook with Case*. West Hardford Connecticut: Cumarian Press.
- Uphoff, Norman and Esman, Milton J. (1984). *Local Organization Intermendiaries In Rural Development Development*. USA: Cornell University Press.
- Wibowo, Agung Pramono. (2011). *Pengembangan Kelembagaan Lokal*. Jakarta: Management